

PENTINGNYA PERAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DALAM MELAKSANAKAN PEMILU

Winsherly Tan, S.H., M.H¹, Jackson Novandy², Sovia Febriana³, Darwin⁴, Wesley Fu⁵, Patrick⁶, Syaiba Suci Ramadhini⁷, Imelda Vangoh⁸, Nabila Jadwa Syahrani⁹, Jennifer¹⁰, Supendi, Felix Javier¹¹, Felix¹², Billgates Kho¹², Jason Fedrico¹³, Arthur Chandra Lunardi¹⁴, Deky Kurniawan¹⁵, Christian Hadinatan Putra¹⁶

Universitas Internasional Batam

e-mail: winsherly.tan@uib.edu¹, 2351051.jackson@uib.edu², 2342051.sovia@uib.edu³, 2341121.darwin@uib.edu⁴, 2341117.wesley@uib.edu⁵, 2341118.patrick@uib.edu⁶, 2311005.syaiba@uib.edu⁷, 2341107.imelda@uib.edu⁸, 2341109.nabila@uib.edu⁹, 2341115.jennifer@uib.edu¹⁰, 2341123.supendi@uib.edu¹¹, 2331057.felix@uib.edu¹², 2342057.billgates@uib.edu¹³, 2332018.jason@uib.edu¹⁴, 2351048.arthur@uib.edu¹⁵, 2331058.deky@uib.edu¹⁶, 2341122.christian@uib.edu¹⁷

Abstrak

Sebagaimana diketahui, pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Pengawasan saat pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilihan umum dengan harapan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan pemilu yang dilakukan bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pemilihan umum yang mungkin terjadi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui buku-buku referensi, publikasi resmi, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan dengan melakukan pengawasan yang baik proses pemilu akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta pengawasan pemilu juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini akan sangat membantu serta diterima dengan baik untuk melancarkan artikel bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah artikel ilmiah yang baik dan benar.

Kata Kunci : Pemilu, Pengawasan, Pelanggaran, Pemilihan, Umum, Keadilan, Integritas

Abstract

As is known, general elections are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly once every five years based on article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution. Supervision during elections is one of the important aspects in maintaining the integrity and fairness of the general election process with the hope All stages of the election run in accordance with applicable legal provisions. Election supervision is carried out with the aim of preventing and detecting general election violations that may occur. Data and information collection is carried out through reference books, official publications and scientific articles. The results of the research show that by carrying out good supervision the election process will run in accordance with the principles of democracy and election supervision also plays a role in increasing public awareness and participation in the democratic process. The suggestions that can be given in this research will be very helpful and well received in launching the article. can be further developed into a good and correct scientific article.

Keywords: Election, Supervision, Violations, Election, General, Justice, Integrity

Pendahuluan

Pengawasan dalam pemilu perlu ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya dikarenakan pemilu termasuk sebagai salah satu peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa indonesia setiap lima tahun. Pemilu dilaksanakan untuk menentukan pemimpin indonesia dan masa depan indonesia untuk lima tahun kedepan. Dalam hal ini perlunya pencegahan dan pengawasan yang harus dilakukan agar proses berjalannya pemilu dapat dijalankan dengan baik dan benar.

Dalam menjalankan keamanan dan ketertiban dalam pemilu ini diperlukannya partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan juga pengawasan dalam pemilu namun dengan bantuan masyarakat pengawasan dan pencegahan dalam pemilu dapat di minimalisir agar dapat berjalan lebih baik lagi. Masyarakat tentunya menginginkan pemimpin yang dapat membawa bangsa dan negara ini maju oleh karena itu, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam kegiatan ini membantu pemerintah agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi dalam pemilu ini.

Terdapat berbagai cara telah dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran dalam pemilu ini seperti jangan melakukan adu domba di media sosial ataupun secara langsung karena hal ini dapat memicu perpecahan dalam negeri ini. hal yang dapat dilakukan ialah saling menghargai satu sama lain walaupun pilihan kita beda bukan berarti kita harus berpecah karena pilihan kita ini adalah kepercayaan kitaterhadap maju atau tidaknya bangsa dan negara ini. dan yang terakhir kita dapat mematuhi peraturan- peraturan yang harus ditaati ketika ingin melakukan pemilihan di TPS.

Terdapat berbagai dampak yang dapat ditimbulkan jika kita sebagai pemerintah dan masyarakat indonesia tidak dapat menjaga pemilihan umum dengan baik dan benar. Masyarakat akan merasa ragu dalam memilih pemimpin indonesia yang akan berujung golput. Selain itu akan adanya perpecahan kubu karena timbulnya adu domba yang muncul. Oleh karena itu, untuk menghindari hal – hal tersebut pengawasan dan pencegahan pemilu ini perlu dilaksanakan dengan serius karena dampak negatif yang timbul sangatlah berbahaya bagi bangsa dan negara ini.

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah membagi beberapa organisasi untuk melaksanakan tugasnya dalam pemilu. KPU dan Bawaslu sangatlah diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kedua organisasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pencegahan dan pengawasan dalam melaksanakan Pemilu. Sebagai masyarakat kita harus turut serta membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Pemilu merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga tanggung jawab masyarakat. Dalam menjalankan pemilu kita perlu melaksanakan dengan baik dan benar dikarenakan pemilu inilah yang akan menentukan kemajuan bangsa ini selama lima tahun kedepan. Oleh karena itu, marilah kita bersama – sama sebagai masyarakat indonesia untuk selalu menjaga keamanan dan melakukan pencegahan dan juga pengawasan terhadap Pemilu di Indonesia.

Masalah

Adanya pelanggaran pemilu merupakan tantangan dalam pemilu terhadap integritas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. pelanggaran pemilu dapat

berasal dari temuan atau laporan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu serta laporan oleh pemantau pemilu, masyarakat Indonesia yang dapat memilih. dan. kepada Bawaslu. masalah pelanggaran pemilu dapat dalam bentuk manipulasi daftar pemilih, intimidasi pemilih, pelanggaran kode etik, serta kecurangan perhitungan surat suara.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan melakukan pencegahan yang tepat diharapkan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Pelanggaran pemilu ini seringkali terjadi karena timbulnya adu domba yang ada di dalam media sosial. Di zaman modern ini media sosial menjadi sumber utama dalam menerima informasi yang akan diterima oleh masyarakat.

Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu ini terus menjadi masalah bagi pemerintah karena tidak dapat menjalankan pemilu sesuai yang diharapkannya. Dalam melaksanakan tugasnya pun masyarakat perlu juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pemilu. Namun karena berita dan juga informasi yang ada di media sosial ataupun internet masyarakat di adu domba sehingga setiap pemilu selalu muncul perpecahan sehingga hal inilah yang selalu menjadi permasalahan utama dalam melaksanakan pemilu.

Selain itu, pelanggaran yang terjadi saat pemilihan juga terjadi dimana beberapa masyarakat yang kurang memahami bagaimana proses pencoblosan dilaksanakan sehingga saat perhitungan surat suara dianggap tidak sah. Selain itu, adanya masyarakat yang memilih untuk Golput sehingga tidak melakukan pemilihan juga menjadi permasalahan utama. Dalam hal ini kita perlu bersama – sama dengan pemerintah untuk segera menyelesaikan segala hambatan yang sering terjadi.

Metode

Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Pemilu ini menggunakan Metode Kualitatif dimana kami menggunakan analisis yang di deskripsikan dari hasil pengamatan kami yang kami lakukan saat Hari Rabu, 14 February 2024 saat berlangsungnya Pemilu. Kegiatan Pencegahan dan pengawasan pemilu dimulai di pagi hari sesuai dengan TPS masing – masing.

Dari hasil pengamatan metode ini kami gunakan dengan tujuan untuk memahami bagaimana proses pengawasan dan pencegahan pemilu agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi. Dalam pengamatan ini kita memahami bagaimana proses awal hingga akhir dilaksanakannya pemilu ini. dari hasil pengamatan kami Pemilu ini dilaksanakan pada Pukul 07.00 WIB hingga 02.00 WIB. Dimana para pengurus Pemilu dan Bawaslu sudah bersiap siaga dalam menjalankan Tugasnya untuk menjaga Pemilu.

Dari hasil pengamatan kami proses pengawasan dan pencegahan pemilu ini dilaksanakan dengan sangat ketat dari awal masyarakat yang harus mulai mengisi data dan mulai mengantri kemudian mengambil nomor urutan. Dalam pemilihan juga diberi jarak dan juga keamanan yang ketat dilaksanakan oleh para petugas dan pengurus. Selain itu proses pencegahan dan pengawasan pemilu ini juga dilakukan dengan berganti shift sehingga pengamanan dapat dilakukan secara maksimal dan ketat agar tidak adanya pelanggaran yang dapat dilakukan.

Proses pemilu ini juga berlangsung hingga malam dimana saat malam hari pihak bawaslu dan juga pengurus pemilu mulai melakukan perhitungan suara dengan sangat rapat agar tidak tersebar informasinya kepada masyarakat terlebih

dahulu. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dimana kami melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan pemilu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan.

Pembahasan

Meminimalkan pelanggaran dengan salah satu cara sebagai pengawasan partisipatif akan berdampak besar apabila pengawasan dilakukan secara aktif dan baik. Kegiatan yang dilakukan sebagai pengawasan partisipatif adalah melakukan pengecekan daftar pemilih melalui portal dpt terhadap diri sendiri dan keluarga. Dengan adanya pengecekan telah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 memudahkan proses pendataan pemilih dan meminimalisir kecurangan,

Kemudian Bawaslu juga turut mengajak untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan melakukan pemantauan sebagai pengawasan partisipatif dengan melaporkan kepada Bawaslu apabila ada dugaan tindak pelanggaran pemilu. Pemantauan dilakukan di sosial media yang tersedia seperti Instagram, twitter, facebook, dan youtube. Melalui media sosial, Bawaslu turut mengajak dan melakukan edukasi masyarakat terkait kepemiluan. Hal yang dilakukan seperti, membuat konten yang dilakukan dengan rutin yang berhubungan dengan pemilu dan pelanggarannya.

Aksi selanjutnya sebagai pemantau partisipatif adalah melakukan pengawasan pada TPS daerah masing-masing. Sebagai pemantau partisipatif turut mengawasi berjalannya pemilu dari awal hingga akhir kegiatan dan melaporkan dan mengisi sejumlah data pada *gform* yang telah disediakan.



Untuk memastikan pemilu yang adil, jujur, dan transparan diperlukan Langkah Pencegahan yang perlu dilakukan. Pertama, mendorong Lembaga independent seperti organisasi masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk turut berpartisipasi melakukan pengawasan pemilu, melakukan pelatihan kepada pengawas pemilu dengan tujuan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran.

Selain itu, perlunya peningkatan teknologi yang aman dan transparan yang memadai untuk mengurangi risiko manipulasi suara dan pelaporan pelanggaran yang secara tepat dan benar dapat dibuktikan. Pada pemilu tahun ini, Bawaslu telah melakukan Langkah yang meminimalkan pelanggaran pemilu yakni dengan mengadakan aksi sosialisasi ke sekolah sekolah akan pentingnya kesadaran hak pilih yang dimiliki, serta Bawaslu mengajak untuk turut melakukan pengawasan partisipatif pencegahan pelanggaran pemilu sebagai pemantau partisipatif.



Pengawasan dan pencegahan dalam pemilu adalah serangkaian tindakan dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil, jujur, dan transparan. Kedua aspek ini sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya.



Proses pemilu harus dipantau, karena kecurangan dan pelanggaran harus diantisipasi dan ditindak. Badan Pengawas Pemilihan umum memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan umum mengawasi pelaksanaan pemilihan

dengan mengacu pada peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan. Untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu membentuk Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dibentuk dengan tujuan untuk mengukur potensi kerawanan yang timbul sebagai hasil dari pelanggaran dan kecurangan Pemilu.

berdasarkan pada pengalaman sebelumnya dengan pelaksanaan pemilu, Bawaslu telah berupaya untuk melakukan pembaruan pembaruan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu. Hal ini ditunjukkan dalam rencana strategis Bawaslu sebagai berikut,

yaitu :

1. Menciptakan dan meningkatkan mutu kebijakan pengawasan Pemilu.
2. Meningkatkan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu.
3. Meningkatkan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen.
4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota pengawas Pemilu.
5. Mengembangkan pola dan metode pengawasan.
6. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, Sistematis, dan komprehensif yang berbasis teknologi.
7. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kerjasama antar Lembaga
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Penelitian Supriyadi & Purnamasari, (2023) menekankan bahwa Bawaslu harus melakukan pengembangan ulang yang tepat untuk menangani pelanggaran administratif pemilu setelah hasil pemilu dinyatakan sah, dengan tujuan untuk menghindari adanya

kesinggungan kebijakan dalam pemeriksaan antara Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum terkait hasil pemilu. Pengembangan ulang yang tepat mencakup perubahan dalam sistem dan mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu terbagi dengan jelas. Dengan demikian, proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara adil, transparan, dan efisien. Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu di Indonesia, oleh karena itu riset Yuhandra, Rifa'i, Akhmaddhian, Budiman, & Andriyani (2023), menyatakan bahwa Bawaslu harus melakukan identifikasi dan menganalisis pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kerjanya.



Hal ini dilakukan melalui proses pengumpulan informasi, pelaporan, dan pengaduan dari masyarakat serta analisis data terkait pemilu. Bawaslu bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti kepolisian, untuk memastikan integritas dan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Koordinasi ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menanggapi secara efektif pelanggaran pemilu yang terjadi.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu, mengkoordinasikan, mengendalikan,

membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan Bawaslu melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, menyelidiki dugaan Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilu, serta memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

pemilu merupakan suatu perihal yang tidak lepas dari Politik uang yang berpengaruh pada pemilihan, serta memengaruhi demokrasi pemilihan dengan memberi uang kepada masyarakat atau menjanjikan imbalan materi. Hal ini akan mempengaruhi tindakan atau perilaku masyarakat dalam pemilihan umum.

Simpulan

Metode pengawasan partisipatif melalui media sosial, sosialisasi di sekolah, pelatihan pengawas pemilu, dan penggunaan teknologi yang aman berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, penting bagi pemerintah, Bawaslu, dan masyarakat untuk bekerja sama dan berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu. Hal ini diperlukan agar proses pemilu dapat terlaksana dengan baik, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan membawa kemajuan bagi bangsa dalam lima tahun ke depan.

Daftar Pustaka

Bidja, I. (n.d.). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2740/2187>

Supriyadi, S., & Purnamasari, A. I. (2023). Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results: Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 159-178.

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1-18.

Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 11(3).